

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Permasalahan ekonomi yang paling mendasar ialah kemiskinan, dimana kemiskinan dapat menyebabkan turunnya kesejahteraan dan menghambat pembangunan ekonomi disuatu wilayah. Di Indonesia jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 berjumlah sekitar 24,79 juta orang atau sebesar 9,22% dari total penduduk di Indonesia. Salah satu wilayah yang cukup tinggi tingkat kemiskinannya adalah Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa terdapat 2,56 juta orang penduduk miskin dengan persentase sebesar 8,29%, artinya Pulau Jawa memiliki setengah populasi penduduk miskin di Indonesia di wilayahnya. Sementara untuk jumlah penduduk miskin terendah yaitu Pulau Kalimantan dengan jumlah 961,51 ribu orang, atau sama dengan 5,81% (Badan Pusat Statistik, 2019).

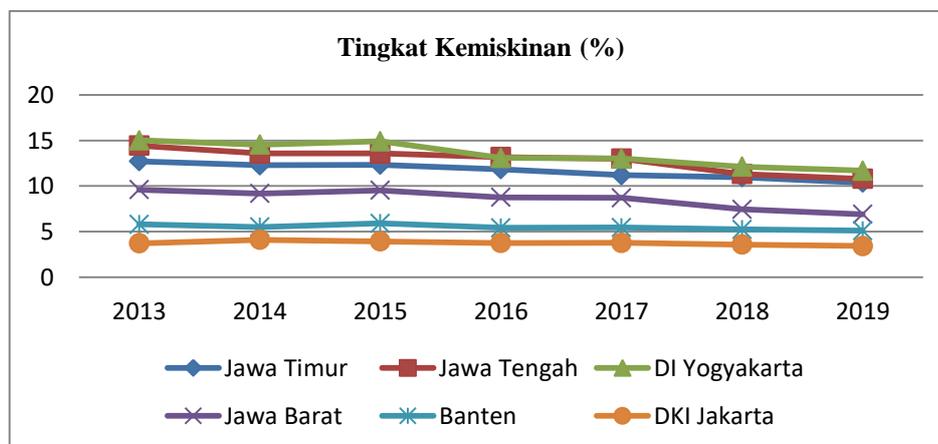
Pulau Jawa merupakan wilayah yang dijadikan pusat perekonomian, dan pembangunan infrastruktur yang cukup baik di Indonesia. Secara umum sentralisasi pembangunan di Pulau Jawa dianggap menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka kemiskinan disetiap tahunnya. Pembangunan ekonomi yang tidak pindah ke daerah lain mengakibatkan terjadi peningkatan jumlah penduduk disetiap tahunnya. Meskipun di Pulau Jawa pendapatan per kapitanya terus meningkat, namun jika terjadi peningkatan jumlah penduduk secara terus menerus, maka hal inilah yang mengakibatkan Pulau Jawa memiliki angka kemiskinan tertinggi di Indonesia (Ilham, 2015).

Pertambahan jumlah penduduk di Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh migrasi masyarakat dari luar Pulau Jawa yang memiliki harapan untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak, namun hal ini berdampak pada meledaknya pertumbuhan angkatan kerja. Namun, kesempatan kerja yang tersedia seringkali tidak setara dengan jumlah angkatan kerja, oleh karena itu tidak seluruh angkatan kerja mendapatkan pekerjaan, akibatnya terjadi pengangguran yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok (Dinas Tenaga Kerja, 2019).

Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka tingginya angka kemiskinan dapat menjadi permasalahan bagi perekonomian itu sendiri. Masyarakat miskin memiliki daya beli yang rendah sehingga tingkat konsumsi terhadap barang dan jasa menurun, masyarakat miskin juga mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Sehingga pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk melakukan pembangunan ekonomi, dan di berbagai sektor ekonomi akan terhambat pertumbuhannya secara tidak langsung (Novriansyah, 2018). Ketika konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok rendah, maka akan berdampak pada agregat pertumbuhan ekonomi yang menjadi tidak stabil, karena konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dalam suatu perekonomian (Sasmita, 2019).

Menurut Todaro, keterbelakangan kemiskinan penduduk disebabkan karena beberapa faktor yaitu jumlah penduduk dan angka kelahiran yang tinggi sehingga pertumbuhan angkatan kerja meningkat tajam. Banyaknya angkatan kerja jika tidak diikuti dengan perluasan lapangan kerja mengakibatkan produktivitas kerja masyarakat dan pendapatan per kapita menjadi rendah. Rendahnya pendapatan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam meningkatkan standar hidup. Karena rendahnya pendapatan akan berdampak buruk pada kondisi kesehatan, rendahnya peluang untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan serta menimbulkan permasalahan lainnya (Todaro, 1993).

**Grafik 1. Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2013 – 2019**

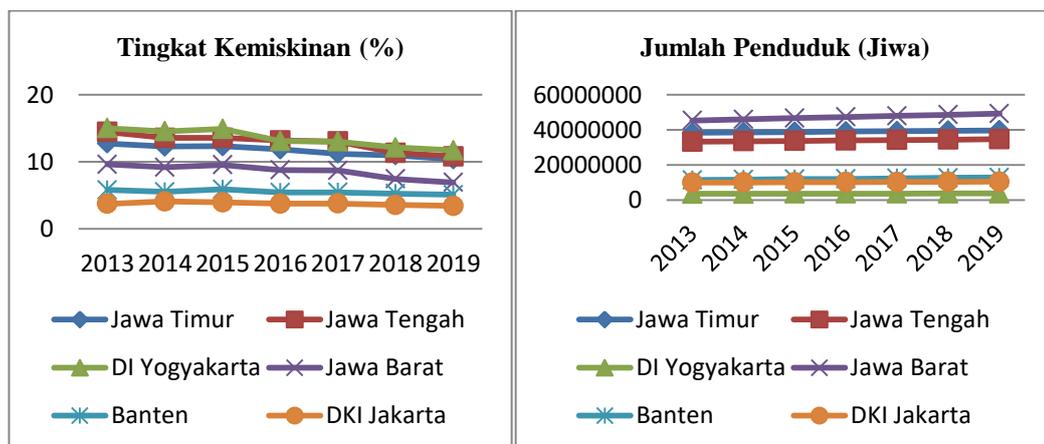


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Di Pulau Jawa terdapat 6 Provinsi, Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tergolong tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, tingkat kemiskinan provinsi DKI Jakarta dan Banten tergolong rendah. Berdasarkan grafiker 1, tingkat kemiskinan pada seluruh provinsi Pulau Jawa mengalami kenaikan pada tahun 2015 yang disebabkan karena kenaikan inflasi yang menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat tingginya harga kebutuhan pokok (Giovani, 2018). Pada tahun-tahun berikutnya tingkat kemiskinan di Pulau Jawa mengalami penurunan, meskipun demikian tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia masih dimiliki oleh wilayah Pulau Jawa.

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 1.184 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019, pulau ini menjadi tempat tinggal dari 60% populasi Indonesia. Jumlah penduduk di Pulau Jawa selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya karena Pulau Jawa menjadi pusat pembangunan ekonomi dan secara historis Pulau Jawa merupakan daerah yang subur sehingga terdapat banyak permukiman. Namun, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat mengakibatkan penurunan daya dukung, daya tampung, kemampuan sumberdaya, menghambat pembangunan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial ekonomi lainnya (Fitriatus, 2021).

**Grafik 2. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk di Pulau Jawa Tahun 2013 – 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Varenia Deby Alsya, 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnc.ac.id]

Berdasarkan grafik 2, selama periode 2013-2019 jumlah penduduk di seluruh provinsi yang terdapat di Pulau Jawa selalu terjadi penambahan setiap tahunnya, tetapi tingkat kemiskinan di seluruh provinsi Pulau Jawa justru terjadi pengurangan dari tahun 2017 - 2019. Hal ini berbeda, dengan teori dikatakan oleh Todaro mengenai keterbelakangan kemiskinan, dimana secara teori besarnya jumlah penduduk dianggap menjadi beban dalam pembangunan dan dapat meningkatkan kemiskinan disuatu wilayah.

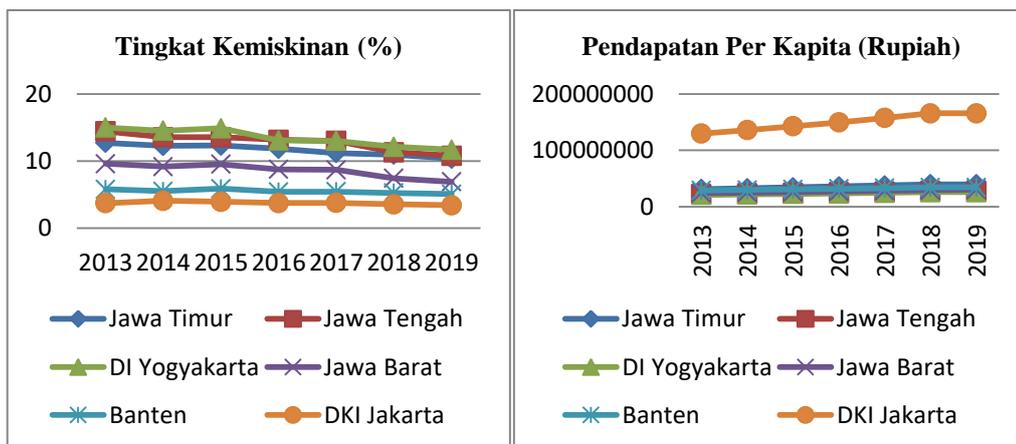
Meskipun kemiskinan di Pulau Jawa mengalami penurunan, namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan, pasalnya menurut BPS dalam beberapa tahun ini terjadi perlambatan pada penurunan kemiskinan di Pulau Jawa yaitu penurunannya berkisar 0.5% sedangkan penambahan jumlah penduduknya lebih cepat yaitu 1.5% setiap tahunnya. Akibatnya pemerataan bantuan sosial dan distribusi beras sejahtera (rastra) yang diperuntukkan masyarakat miskin menjadi terhambat dan tidak merata karena jumlah penduduk yang selalu bertambah, maka dari itu jumlah penduduk miskin Pulau Jawa masih tetap tinggi tiap tahunnya (Mustami, 2017). Selain itu, Pulau Jawa menjadi wilayah terpadat penduduk dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, menurut Arsyad (2016) pola penyebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah mengakibatkan semakin ketatnya kompetisi dalam mendapatkan lapangan kerja. Jumlah penduduk yang besar di Pulau Jawa menyebabkan tingginya angkatan kerja, dan angkatan kerja di Pulau Jawa merupakan yang tertinggi diantara pulau lainnya yaitu sebesar 56.76% pada tahun 2017, pertumbuhan angkatan kerja perlu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, namun hingga saat ini Pulau Jawa masih tidak terlepas dari masalah pengangguran. Orang yang tidak memiliki pekerjaan ini lambat laun standar hidupnya akan menurun karena tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Wihastuti, 2017).

Provinsi Yogyakarta memiliki jumlah penduduk paling sedikit, namun tingkat kemiskinannya menunjukkan angka yang lebih tinggi hingga melampaui angka kemiskinan nasional disetiap tahunnya, menurut kepala Bappeda DIY hal ini disebabkan karena adanya *inclusion error* yaitu masyarakat yang tergolong mampu tetapi mendapatkan bantuan dan *exclusion error* yaitu masyarakat tidak

mampu dimana seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkannya, sehingga orang miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan dalam kasus ini tidak mendapatkannya (Purnomo, 2019).

Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang dapat menghambat pencapaian program pemerintah. Sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan disuatu wilayah (Nunuk dkk, 2019). Pendapatan perkapita merupakan indikator pembangunan dan tingkat kesejahteraan suatu wilayah, semakin tinggi pendapatan perkapita, maka semakin makmur wilayah tersebut. Konsep dasar kemiskinan berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan dasar. Apabila penghasilan yang diterima tidak dapat melengkapi kebutuhan dasar, maka orang itu dikategorikan miskin (Darma & Puruwita, 2012).

**Grafik 3. Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Pulau Jawa Tahun 2013 – 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan grafik 3, pendapatan perkapita di Pulau Jawa selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013-2019. Meskipun pendapatan perkapita selalu mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap kemiskinan dapat dikatakan belum optimal karena penurunan angka kemiskinan yang cukup lambat yaitu rata-rata penurunannya hanya 0.5% setiap tahunnya. Selain itu, kenaikan pendapatan per kapita yang terjadi di Pulau Jawa dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk, bukan dengan kenaikan upah/gaji yang diterima masyarakat, bahkan Pulau Jawa yang merupakan pusat perekonomian namun memiliki 4

Varenia Deby Alsya, 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

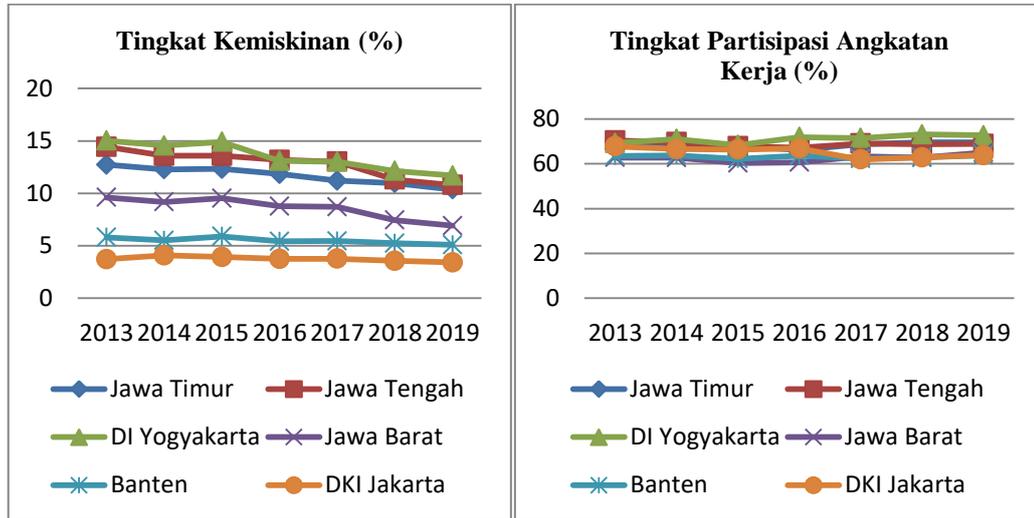
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnc.ac.id]

Provinsi yang memiliki upah minimum provinsi (UMP) paling rendah di Indonesia dan angkanya dibawah 2 juta rupiah alias pada kisaran 1 juta rupiah yaitu Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa tengah (Deny, 2018). Selain itu masih terdapat ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Jawa contohnya pada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Pendapatan per kapita DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 165,872 Juta Rupiah sedangkan Provinsi lainnya seperti Yogyakarta hanya 25,776 Juta Rupiah. Menurut BPS, seluruh Provinsi di Pulau Jawa memiliki ketimpangan pendapatan diatas 0.35% yang artinya ketimpangan di Pulau Jawa berada di level sedang sehingga menunjukkan bahwa Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian, namun pencapaian kesejahteraannya belum merata (Sovita, 2016). Idealnya kesejahteraan masyarakat dapat dicapai ketika pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita masyarakat besar dan diikuti dengan pemerataan pendapatan antar daerah sehingga setiap orang memiliki pendapatan yang sama besarnya (Arsyad, 2016). Namun nyatanya di Pulau Jawa masih terdapat ketimpangan pendapatan sehingga Pulau Jawa memiliki angka kemiskinan tertinggi setiap tahunnya. Menurut Todaro (1993) meningkatnya pendapatan per kapita berarti meningkat pula daya beli masyarakat disuatu wilayah sehingga kesejahteraan dapat meningkat, namun faktanya meningkatnya pendapatan per kapita tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan, seperti yang terjadi di tahun 2015, dimana tingkat pendapatan per kapita di Pulau Jawa meningkat, sementara tingkat kemiskinan pun juga mengalami peningkatan yang dikarenakan adanya peningkatan harga listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Jawa sehingga mengakibatkan kenaikan inflasi. Inflasi yang tinggi membuat masyarakat yang sebelumnya hidup diatas garis kemiskinan dan rentan miskin, turun kebawah garis kemiskinan (Gunawan, 2015). Fenomena yang sama juga terjadi pada Provinsi Banten di tahun 2017, dimana pendapatan per kapita meningkat namun tingkat kemiskinan pun mengalami kenaikan yang disebabkan karena adanya peningkatan harga komoditi makanan seperti beras, telur, ayam ras dan mie instan (Tirta, 2017).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan penduduk usia kerja yang memiliki produktivitas atau secara ekonomi aktif bekerja dalam kegiatan sehari-hari. Meningkatnya angkatan kerja jika tidak dibarengi oleh

penyediaan lapangan pekerjaan menyebabkan rendahnya kesempatan kerja yang berujung pada meningkatnya jumlah penduduk miskin karena peluang untuk mendapatkan pendapatan semakin kecil (Lail, 2017)

**Grafik 4. Tingkat Kemiskinan dan TPAK di Pulau Jawa Tahun 2013 – 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan gambar 4, TPAK di 6 Provinsi Pulau Jawa mengalami perkembangan fluktuatif dengan tren meningkat. Pada tahun 2014 rata-rata TPAK mengalami penurunan, namun fenomena yang terjadi yaitu tingkat kemiskinan di Pulau Jawa juga ikut mengalami penurunan. Fenomena yang sama terjadi pada tahun 2019, TPAK di Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun tingkat kemiskinan di Yogyakarta pun ikut mengalami penurunan, penyebab turunnya TPAK di Yogyakarta merupakan akibat adanya penurunan jumlah lapangan kerja (Kominfo Jogja Kota, 2020). Fenomena ini tidak sesuai dengan teori Todaro, dimana seharusnya ketika TPAK menurun, maka tingkat kemiskinan naik karena TPAK yang rendah, dapat menurunkan pendapatan per kapita. Provinsi Banten memiliki TPAK yang rendah daripada Provinsi lainnya yang terdapat di Pulau Jawa, yang disebabkan karena buruknya kualitas pendidikan, dan penawaran pekerjaan yang hanya memilih SDM berpendidikan tinggi, sementara penduduk yang memiliki pendidikan rendah condong selalu mau menerima pekerjaan apapun. Sehingga terjadi pergeseran penduduk dari angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja (Chaidir, 2019). Apabila terjadi penurunan

Varenia Deby Alsya, 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA  
 UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan  
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnc.ac.id]

angkatan kerja, maka akan berdampak pada rendahnya tenaga kerja yang tersedia untuk melakukan proses produksi dan mendorong kegiatan ekonomi, apabila TPAK rendah maka produktivitas menjadi turun sehingga pendapatan yang di terima masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjadi rendah sehingga kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Beberapa penelitian mengenai kemiskinan yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian Durotul Mahsunah (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur” menemukan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian Elda Wahyu Azizah, dkk (2018) dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur” menemukan bahwa jumlah penduduk dan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Sementara penelitian yang dilakukan Hyashinta Tampubolon dan Iskandar Muda (2021) dengan judul “*The Effect Of Total Population, Median Income, And Unemployment Rate On Poverty Risk In Europe*”, menemukan bahwa *The total population Rate has positive effect towards Poverty Risk and median income does not have positive and significant effect towards poverty risk.*

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan adanya ketidaksamaan antara teori dan data, membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Pulau Jawa**”

## **I.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan kemiskinan menjadi beban bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah. Ketika kemiskinan tinggi, maka daya beli seseorang terhadap barang dan jasa akan menurun, hal ini akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pulau Jawa menduduki posisi pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia disaat kondisi pendapatan per kapita yang sudah cukup baik setiap tahunnya yang seharusnya dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan kemiskinan secara efektif. Selain itu, jumlah

penduduk yang terus meningkat menyebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja yang tentunya harus diikuti pula dengan perluasan lapangan kerja. Namun data tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan angka yang fluktuatif, artinya angkatan kerja yang berkontribusi pada kegiatan ekonomi jumlahnya tidak stabil setiap tahunnya. Sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh dari jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan TPAK terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan Pulau Jawa?
- b. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap kemiskinan Pulau Jawa?
- c. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap kemiskinan Pulau Jawa?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan Pulau Jawa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap kemiskinan Pulau Jawa.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap kemiskinan Pulau Jawa.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti dan pembaca untuk memperoleh informasi dan wawasan mengenai faktor –faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Serta

sebagai bahan acuan, informasi atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti topik kemiskinan di Pulau Jawa.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah dalam penyusunan strategi dan program kebijakan penanggulangan kemiskinan di Pulau Jawa

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat mengenai pengaruh dari jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan TPAK terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

3) Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperluas ilmu pengetahuan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa.